

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

Jl. T. JALAN LING (L) R.M. JAYA TATA 209 TELPOK, 73205 BONDONG

Surat : 404 / 1.02.A/D 1981

Bondong, 23 September 1981

Lamp. : 1 (satu) stel

Isi. : Pengelolaan sekolah yang ditunjangkan dan yang ditaka-

Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala SMP/SMK Negeri Pengelola Filial yang ditunjangkan
2. Sdr. Kepala SMP/SMK Negeri pengelola SMP/SMK Unit baru tahun 1981

di
JAWA BARAT.

Selamatan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor : 0219/0/81 dan Nomor : 0270/0/1981 tanggal 14 Juli 1981 yang salinannya terlampir, kami harapkan perhatian Saudara akan hal hal sebagai tersebut :

1. SMP/SMK Negeri yang namanya terlampir dalam Surat Keputusan tersebut di atas, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981 secara resmi telah ditunjangkan dan diuka sebagai suatu sekolah yang mandiri.
2. Seambil menunggu penetapan Kepala SMP/SMK Negeri secara definitif, akan di terbitkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat kepada salah seorang pejabat untuk sementara mengelola SMP/SMK baru tersebut.
3. Hendaknya Saudara segera membuat cap dan papan nama sekolah menurut petunjuk terlampir.
4. Segera diusulkan calon Bendaharawan UUP dan SIP menurut persyaratan yang berlaku, bila perlu mengambil salah seorang Guru/Pegawai Tata Usaha dari SMP/SMK pengelola.

Demikian agar Saudara maklumi.



AN. KEP. W. KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

D. S. O. E. K. I. R. N. O
NIP. 130030233.-

Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat di Bondong, sebagai laporan,
2. Kepala Kantor Departemen P dan K Kab/Kota se Jawa Barat,
3. Ar n i p.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 0219/0/1981
tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di seluruh Iriks-
resia.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Keju-
tuan Presiden Republik Indonesia No.62 tahun 1981.
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14 A tahun 1980, jo No. 18 tahun 1981
5. No. 40/M tahun 1980 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 dan No. 0222h/0/1980
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya
tanggal 9 Juli 1981 No. B-736/I/MENPAN/7/81.

M E N U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- Portum :** Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasinya tera-
tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan terse-
but pada pasal " Portum " bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah-
nya masing-masing.
- Ketiga :** Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di
Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana
tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan ur-
tuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam
ketentuan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut ter-
hitung mulai tanggal 1 Juli 1981.



MENGUNTAHUI
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981
M. TEBI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal
t.t.d.

Sootanto Wirjoprananto

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretariat Kabinet
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara
5. Semua Menteri
6. Semua Menteri Muda
7. Sekjen Dept. P dan K
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K
10. Kepala DFJK pada Dep. P dan K
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan DFJK dalam lingkungan Dep. P dan K
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dept. Kehakiman
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat, Inspektur dan P.H dalam lingkungan Dep. P dan K
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dept. P dan K di Propinsi
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I
16. Semua Koordinator Lembaga Tinggi dan Swasta
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K
18. Badan Administrasi Pemerintahan Negara
19. Badan Penelitian dan Pengembangan
20. Ditjen Angkasa
21. Ditjen Pajak
22. Dit Perhubungan dan Kelautan Negara Ditjen Angkutan Dep. Keuangan
23. Semua Kantor Perhubungan Negara
24. Ketua DP H.I.
25. Komisi IX DPR-RI
26. Sekolah yang bersangkutan,

Selain dari salinan dengan salinan
 I. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Perencanaan
 dan Perundang-undangan Dep. P dan K

Cc: ttd.

SUMARTO, S.H.
 No. 130317250

Selain dari salinan dengan salinan
 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN TENGGAH UMUM
 KEMISI DEP P DAN K PROF. JAWA BARAT

SUMARTO SURADJI
 No. 130428604



MENGETAHUI
 MANAJER 4 BOGOR

[Handwritten signature]

[Faint handwritten notes and stamps in the bottom right corner]

09.1.2.1036.23.01.02.110
 09.1.2.1038.23.01.02.120
 09.1.2.1035.23.01.02.140
 09.1.2.1035.23.01.02.210
 09.1.2.1035.23.01.02.220
 09.1.2.1036.23.01.02.231
 09.1.2.1038.23.01.02.232
 09.1.2.1038.23.01.02.233
 09.1.2.1038.23.01.02.250
 09.1.2.1038.23.01.02.340
 09.1.2.1036.23.01.02.360

Kab. Bogor
 Kabupaten Tangeulang
 Kabupaten Pandeglang
 Kabupaten Lebak
 Kabupaten Lebak
 Kabupaten Tangerang
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Sukahuni
 Kabupaten Cianjur
 Kabupaten Cianjur
 Kabupaten Bandung
 Kabupaten Bandung
 Kabupaten Bandung
 Kabupaten Garut
 Kabupaten Tasikmalaya
 Kabupaten Tasikmalaya
 Kabupaten Majalengka
 Kabupaten Majalengka
 Kabupaten Kuningan
 Kabupaten Indramayu
 Kabupaten Subang
 Kabupaten Karawang
 Kabupaten Karawang
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bandung
 Kabupaten Tasikmalaya
 Kabupaten Bandung

Kab. Bogor
 Kabupaten Tangeulang
 Kabupaten Pandeglang
 Kabupaten Lebak
 Kabupaten Lebak
 Kabupaten Tangerang
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Sukahuni
 Kabupaten Cianjur
 Kabupaten Cianjur
 Kabupaten Bandung
 Kabupaten Bandung
 Kabupaten Bandung
 Kabupaten Garut
 Kabupaten Tasikmalaya
 Kabupaten Tasikmalaya
 Kabupaten Majalengka
 Kabupaten Majalengka
 Kabupaten Kuningan
 Kabupaten Indramayu
 Kabupaten Subang
 Kabupaten Karawang
 Kabupaten Karawang
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bandung
 Kabupaten Tasikmalaya
 Kabupaten Bandung

Kab. Bogor
 Kabupaten Tangeulang
 Kabupaten Pandeglang
 Kabupaten Lebak
 Kabupaten Lebak
 Kabupaten Tangerang
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Sukahuni
 Kabupaten Cianjur
 Kabupaten Cianjur
 Kabupaten Bandung
 Kabupaten Bandung
 Kabupaten Bandung
 Kabupaten Garut
 Kabupaten Tasikmalaya
 Kabupaten Tasikmalaya
 Kabupaten Majalengka
 Kabupaten Majalengka
 Kabupaten Kuningan
 Kabupaten Indramayu
 Kabupaten Subang
 Kabupaten Karawang
 Kabupaten Karawang
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bogor
 Kabupaten Bandung
 Kabupaten Tasikmalaya
 Kabupaten Bandung

301.026/02.010 ES.

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN
 P.10.10
 Sekretaris Jenderal
 t.t.t.
 (Sekretaris Manjement)

Selamat dan semoga sukses dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Perumahan dan Pertanahan.

